

LAMPIRAN I.9

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : PER - 53/PJ/2009

TENTANG : BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2), SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 15, PASAL 22, PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 SERTA BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTANNYA

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak yang dipotong
Lembar ke-2 untuk : Penyelenggara Bursa Efek
Lembar ke-3 untuk : Arsip Pemotong Pajak
Lembar ke-4 untuk : Pembeli/Pemegang Obligasi



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

..... (1)

BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2) ATAS BUNGA DAN/ATAU DISKONTO OBLIGASI DAN SURAT BERHARGA NEGARA (SBN)
Nomor : (2)

NPWP : - - - - - (3)

Nama :

Alamat :

	Uraian (1)	Bunga/Diskonto (2)
a.	Nama Obligasi/SBN	
b.	Jumlah nilai nominal	
c.	Nomor seri	
d.	Tingkat bunga/tahun	
e.	Tanggal jatuh tempo bunga terakhir <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
f.	Tanggal perolehan <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
g.	Tanggal penjualan <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
h.	Jumlah harga perolehan bersih (tanpa bunga)	
i.	Jumlah harga jual bersih (tanpa bunga)	
j.	Diskonto (i - h)	
k.	Bunga	
JUMLAH		
PPh Final : (Tarif* x Jumlah Bunga/Diskonto)		
Terbilang :		

*) Tarif berdasarkan PP Nomor 27 Tahun 2008
Tarif berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2009

..... 20 (4)

Pemotong Pajak (5)

NPWP : - - - - -

Nama :

Tanda Tangan, Nama dan Cap

..... (6)

Perhatian :

1. Setiap nama obligasi dengan tanggal perolehan yang berbeda dibuat Bukti Pemotongan tersendiri.
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.
3. Bukti Pemotongan tetap dibuat meskipun PPh Final tidak dipotong bagi bank, dana pensiun dan reksadana yang memenuhi syarat.

